

Peran Paus Fransiskus Melalui *Faith-Based Diplomacy* Sebagai Upaya Pencapaian Perdamaian Dalam Konflik Suriah

Agustina Filadelfia Karlinanti

e1112201028@student.untan.ac.id

Abstract

This study examines Pope Francis's crucial role in promoting peace, particularly regarding the Syrian conflict during the early years of his papacy. From the beginning of his leadership, he actively engaged in dialogue, condemned violence, and advocated for peaceful negotiations. He urged the international community to prevent further violence and prioritize humanitarian solutions. Using a qualitative descriptive method and literature review, the research highlights his initiatives, including collective prayers, public statements, and diplomatic efforts. His influence extends beyond religion to global diplomacy, making him a key advocate for peace and humanitarian values in the Syrian conflict.

Keywords : Pope Francis, Diplomacy, Syrian Conflict

Abstrak

Studi ini mengkaji peran penting Paus Fransiskus dalam mempromosikan perdamaian, terutama mengenai konflik Suriah selama tahun-tahun awal kepausannya. Sejak awal kepemimpinannya, ia aktif terlibat dalam dialog, mengutuk kekerasan, dan mengadvokasi negosiasi damai. Dia mendesak masyarakat internasional untuk mencegah kekerasan lebih lanjut dan memprioritaskan solusi kemanusiaan. Menggunakan metode deskriptif kualitatif dan tinjauan literatur, penelitian ini menyoroti inisiatifnya, termasuk doa kolektif, pernyataan publik, dan upaya diplomatik. Pengaruhnya melampaui agama ke diplomasi global, menjadikannya advokat utama untuk perdamaian dan nilai-nilai kemanusiaan dalam konflik Suriah.

Kata Kunci : Paus Fransiskus, Diplomasi, Konflik Suriah

Pendahuluan

Takhta Suci Vatikan merupakan salah satu negara di Eropa dengan sistem pemerintahan *ecclesiastical elective monarchy* yang dipimpin oleh seorang Paus sebagai *Supreme Pontiff* dengan jabatan yang tidak diwariskan. Pemimpin Gereja Katolik tersebut dipilih oleh Dewan

Kardinal di dalam satu sesi pemilihan tertutup yang disebut konklaf (Bate, 2019). Setelah dipilih, Paus memegang kekuasaan absolut atas Takhta Suci Vatikan dan Gereja Katolik Roma secara umum, tetapi kekuasaannya tetap terbatas oleh hukum kanon, tradisi, dan otoritas Dewan Kardinal.

Takhta Suci Vatikan berdiri sebagai subjek hukum internasional berdasarkan perjanjian antara Italia dan Takhta Suci pada tanggal 11 Februari 1929 atau yang dikenal dengan *Lateran Treaty* dan secara langsung menandakan berdirinya negara Vatikan di Roma dan secara penuh memiliki kedudukan yang setara dengan negara (Kusumaatmadja & Agoes, 2018). Sebagai sebuah negara berdaulat, saat ini Takhta Suci Vatikan telah menjalin hubungan diplomatik dengan 184 negara di dunia dengan menandatangani perjanjian Konkordat, melakukan hubungan bilateral dan multilateral. Kegiatan diplomatik Takhta Suci diatur oleh Sekretariat Negara yang dikepalai oleh Kardinal Sekretaris Negara melalui Bagian Hubungan dengan Negara (Holy See Press Office, 2024). Lateran Treaty 1929 menegaskan kedaulatan Takhta Suci dan mendirikan Negara Kota Vatikan, mengakhiri konflik dengan Italia pasca-penyatuan. Gereja Katolik, sebagai institusi berpengaruh, berkontribusi signifikan dalam seni, budaya, ilmu pengetahuan, serta dinamika politik dan sejarah Eropa. Dan Hubungan Diplomatik tersebut ditandai dengan keikutsertaan Takhta Suci Vatikan diri dalam percaturan internasional melalui aktivitas Paus dan Duta besar berupa kunjungan pastoralnya termasuk pernyataan-pernyataan serta kegiatan perutusan diplomatik di berbagai negara.

Saat ini, Takhta Suci Vatikan berada dalam masa kepemimpinan Paus Fransiskus, salah satu figur agamawan yang mencuri atensi publik di dalam dinamika hubungan internasional semenjak menjadi Paus pada Maret 2013. Sejak awal kepemimpinannya, Paus Fransiskus telah dikatakan sebagai tokoh penting tidak hanya dalam Gereja Katolik, namun juga dalam politik internasional (Rieck dkk, 2015). Paus Fransiskus telah menunjukkan komitmen luar biasa dalam menghadapi berbagai tantangan global seperti kemiskinan, lingkungan, imigrasi, dan konflik bersenjata. Melalui pesan-pesannya yang kuat dan tindakannya yang nyata, Paus Fransiskus terus menjadi suara penting dalam upaya global untuk menciptakan dunia yang lebih damai dan adil.

Paus Fransiskus yang dipilih pada Maret 2013 telah menghadapi dunia yang penuh dengan konflik. Ia andil dalam membenahi hubungan Diplomatik antara Amerika Serikat dan Kuba yang menegang akibat penggulingan rezim oleh Fidel Castro pada tahun 1959. Hal itu diperburuk dengan Embargo yang dilakukan Amerika Serikat dan memaksa Kuba bergantung

pada bantuan ekonomi Uni Soviet dalam bidang perdagangan (BBC News, 2018). Dalam menghadapi konflik tersebut, serangkaian upaya melalui kunjungan dan menuliskan surat Diplomasi sudah dilakukan sebagai bentuk keprihatinan dan dukungannya dalam melawan aksi terorisme yang terjadi.

Paus Fransiskus secara aktif menyerukan penyelesaian damai melalui berbagai pernyataan publik, termasuk saat mengadakan vigil doa internasional pada September 2013.¹ Selain itu, Vatikan menerima surat dari Presiden Suriah Bashar al-Assad pada akhir 2013 sebagai bentuk komunikasi diplomatik yang menunjukkan keterlibatan tidak langsung Vatikan dalam merespons konflik.² Penting juga dicatat bahwa Patriark Katolik Siria, Ignatius Joseph III Younan, menegaskan peran Vatikan sebagai suara moral dalam mencegah intervensi militer terhadap Suriah.³ Pernyataan dan keterlibatan ini turut didukung dengan laporan dari organisasi internasional seperti Amnesty International dan UN OCHA yang menyebutkan posisi Vatikan dalam narasi penyelesaian konflik Suriah.⁴⁵

Kekerasan langsung terjadi seperti pembantaian oleh pihak pemerintah untuk menekan demonstran dengan menggunakan senjata militer menyebabkan jumlah korban tewas mencapai 511.000 jiwa (Human Right Watch, 2019). Ketegangan antara rakyat sipil dan pemerintah ini jelas membuat konflik pecah dan merusak perdamaian, dimana karena adanya konflik menyebabkan berbagai kekerasan, baik secara langsung, struktural dan kekerasan struktural. Konflik Suriah menjadi salah satu krisis kemanusiaan terburuk dalam 20 tahun terakhir, dengan jutaan orang menjadi pengungsi, dan negara tersebut hancur secara infrastruktur dan sosial.

Sejak 2013, segala upaya yang dilakukan dalam mengusahakan perdamaian atas konflik Suriah dijalankan secara resmi oleh Takhta Suci Vatikan dibawah kepemimpinan Paus Fransiskus melalui surat pastoral kenegaraan, berupa kunjungan Takhta Suci ke negara-negara yang memiliki keterkaitan dengan berlangsungnya konflik Suriah (Widianindya, 2018). Paus Fransiskus telah menyatakan penolakannya terhadap konflik dan perang, terutama di Suriah. Perang dan konflik menyebabkan banyak penderitaan dan kerusakan, terutama bagi rakyat sipil dan anak-anak. Paus juga mengutuk penggunaan senjata kimia sebagai upaya negara untuk menghentikan konflik Suriah (Holy See Press Office, 2013). Konflik Suriah dipandang sebagai salah satu isu yang sangat penting secara moral dan kemanusiaan, dan berusaha untuk turut serta dalam upaya mencari solusi damai. Diplomasi berbasis agama dan peran Paus Fransiskus dalam mencapai perdamaian adalah bidang yang kompleks. Penelitian ini menganalisis

bagaimana keyakinan dan nilai-nilai ajaran Gereja Katolik mempengaruhi tindakan dan langkah-langkah diplomasi Paus Fransiskus dalam studi hukum internasional, diplomasi, serta mengidentifikasi peran dan kontribusi unik Paus Fransiskus mengupayakan perdamaian atas konflik di Suriah.

Kerangka Konseptual

Faith-based diplomacy adalah pendekatan dalam diplomasi yang melibatkan pemimpin dan institusi agama dalam proses perdamaian dan diplomasi internasional. Karakteristik utamanya melibatkan pengaruh kuat yang dimiliki oleh pemimpin agama dan institusi keagamaan dalam memediasi konflik melalui proses *peacemaking* (Johnston, 2003). Pendekatan ini mengakui pengaruh yang kuat dimiliki oleh pemimpin agama dan institusi keagamaan dalam memediasi konflik dan mempromosikan perdamaian.

Dalam menganalisis diplomasi berbasis agama, tema yang muncul kembali adalah peran hubungan antara gereja dan negara, yaitu gagasan pemisahan atau sekularisasi. Sebelum teori diplomasi berbasis agama dapat diperiksa secara menyeluruh, perlu dipertimbangkan sekularisasi dan dampaknya terhadap agama dan diplomasi (Johston 2003, dalam Blakemore, 2019). Dengan mempertimbangkan kedua sisi ini, kita dapat mengembangkan pemahaman yang lebih holistik tentang bagaimana agama dan diplomasi saling berinteraksi dalam konteks global saat ini.

Konsep *faith-based diplomacy* yang ditulis oleh Douglas Johnston digunakan sebagai dasar analisis dalam membahas mengenai peran Paus Fransiskus sebagai aktor diplomasi dalam mengupayakan perdamaian dan memediasi negara berkonflik. Dalam konsep ini, terdapat empat poin penting yang harus dimiliki seorang pemimpin agama dalam mengupayakan perdamaian (Johnston, 2003) yaitu:

- a. Seorang pemimpin agama harus memiliki pengaruh dalam komunitas internalnya;
- b. Seorang pemimpin agama harus memiliki reputasi yang baik sebagai kekuatan non politis;
- c. Seorang pemimpin agama mampu menjadi mediator bagi pihak-pihak yang berkonflik dan membangun rekonsiliasi;
- d. Seorang pemimpin agama mampu menggerakkan masyarakat level nasional dan internasional untuk mendukung upaya perdamaian;

(Johnston, 2003)

Selain itu, adapun empat model intervensi yang ditawarkan oleh Johnston yang bisa dilakukan seorang pemimpin agama (Johnston, 2003) yaitu:

- a. Aktor *faith-based diplomacy* berperan dalam menyelesaikan konflik dengan memberikan pandangan baru dan memiliki kemampuan untuk mengarahkan pihak-pihak yang terlibat dalam konflik untuk membangun sebuah hubungan.
- b. Aktor *faith-based diplomacy* memainkan peran yang sangat penting dalam memulihkan konflik melalui mediasi yang didasarkan pada dialog spiritual dengan pihak-pihak yang terlibat
- c. Aktor *faith-based diplomacy* memainkan peran penting dalam memfasilitasi dialog antara pihak yang berkonflik dengan mengintegrasikan nilai-nilai dan prinsip-prinsip spiritual ke dalam proses mediasi.
- d. Aktor *faith-based diplomacy* memiliki peran yang penting dalam melakukan rekonsiliasi untuk memulihkan luka sejarah dari pihak yang berkonflik.

Rekonsiliasi bukan satu-satunya nilai yang digunakan dalam upaya menyelesaikan konflik. Para pembawa damai dari tokoh agama dapat menawarkan harapan yang mendalam dan aspirasi positif yang mampu menembus konflik yang rumit. Dengan menggabungkan unsur rekonsiliasi, harapan, kasih sayang, dan pengampunan dalam proses penyelesaian konflik, berbagai teknik diplomasi telah berkembang untuk memfasilitasi penyelesaian konflik secara damai (Johnston 2003, dalam Blakemore, 2019).

Metode Penelitian

Pada penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis deskriptif. Penelitian kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan (Creswell, 2016). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan eksplanatif-analitis, karena bertujuan menguraikan dinamika diplomasi Vatikan dalam konflik Suriah melalui konstruksi naratif, wacana, serta respon institusional. Metode ini memungkinkan penulis untuk menelusuri relasi antara aktor keagamaan dan politik global secara mendalam, serta menginterpretasikan makna di balik tindakan-tindakan Vatikan yang tidak selalu bersifat formal seperti negara-negara pada umumnya.

Pembahasan

Penelitian dengan menggunakan konsep *Faith-Based Diplomacy* akan menyoroti bagaimana peran Paus Fransiskus dalam upaya mewujudkan perdamaian di tengah konflik

Suriah. *Faith-Based Diplomacy* mengacu pada diplomasi yang memanfaatkan kepercayaan agama sebagai fondasi atau instrumen untuk mencapai perdamaian, terutama di daerah yang dilanda konflik, di mana aspek keagamaan memainkan peran penting dalam dinamika moral, sosial dan politik.

Pandangan Paus Fransiskus terhadap Konflik Suriah Berdasarkan Nilai-Nilai Dasar Ajaran Gereja Katolik

Salah satu instrumen utama yang digunakan oleh Paus dalam diplomasi adalah ensiklik, yang berfungsi sebagai pedoman moral bagi umat Katolik serta sebagai norma dalam membentuk pandangan Gereja terhadap isu-isu global (Youcat Indonesia, 2021; Finnemore, 1996). Ensiklik-ensklik yang dikeluarkan oleh Paus sering kali membahas isu-isu seperti perdamaian, keadilan sosial, hak asasi manusia, serta tantangan global seperti kemiskinan dan perubahan iklim. Dalam hal ini, ensiklik bukan hanya bersifat religius tetapi juga memiliki dimensi politik yang dapat mempengaruhi kebijakan internasional.

Dalam kasus konflik Suriah, Vatikan secara konsisten menekankan bahwa perang bertentangan dengan prinsip perdamaian dan hak asasi manusia yang dijunjung tinggi oleh Gereja Katolik. Oleh karena itu, Takhta Suci Vatikan berupaya mencari solusi damai berdasarkan ajaran sosial Gereja (Nainggolan, 2022). Paus Fransiskus menegaskan bahwa solusi konflik harus mengedepankan martabat manusia dan kemanusiaan di atas kepentingan politik atau ekonomi. Dalam banyak kesempatan, Paus Fransiskus mengajak negara-negara besar untuk mengedepankan nilai solidaritas dan menjauhi kebijakan yang hanya menguntungkan segelintir pihak. Ia juga menekankan pentingnya peran masyarakat sipil dalam menciptakan budaya damai yang berkelanjutan.

Salah satu dokumen utama yang menjadi pedoman diplomasi Paus Fransiskus adalah ensiklik *Evangelii Gaudium* (2013), yang menekankan pentingnya revolusi kasih dan keadilan sosial dalam membangun masyarakat yang lebih harmonis (Konferensi Waligereja Indonesia, 2017). Dalam ensiklik ini, Paus menyoroti beberapa aspek penting, termasuk perhatian Gereja terhadap kaum miskin, pengungsi, dan kelompok rentan (art. 210), keadilan sosial sebagai landasan perdamaian (art. 218), serta pentingnya rekonsiliasi dalam keberagaman (art. 230) (Widianindya, 2018). Ensiklik ini memberikan landasan teologis bagi upaya diplomasi Vatikan dalam menanggapi konflik global. Paus mengajak seluruh umat Katolik untuk keluar dari sikap tertutup dan menuju "Gereja yang keluar" (*Church that goes forth*), yang aktif menjangkau mereka yang terpinggirkan, termasuk kaum miskin dan rentan. Melalui prinsip-prinsip ini,

diplomasi Vatikan di bawah kepemimpinan Paus Fransiskus menitikberatkan pada upaya membangun jembatan antarbangsa, memperjuangkan hak-hak pengungsi, serta mendorong kerja sama lintas agama dan budaya demi menciptakan dunia yang lebih adil dan harmonis.

Upaya Paus Fransiskus Menjembatani Mediasi bagi Suriah melalui Dialog Spiritual dalam Kunjungan Kenegaraan

Sejak Paus Fransiskus menjabat sebagai pemimpin Takhta Suci Vatikan, yaitu pada tahun 2013, krisis Suriah masih berlangsung dan terus membesar. Maka dari itu, Paus Fransiskus memberikan perhatian khusus terhadap krisis Suriah, baik dalam upaya mencari solusi untuk menyelesaikan konflik maupun upaya menangani warga terdampak konflik tersebut (Widianindya, 2018). Sikap Paus Fransiskus mencerminkan komitmennya terhadap keadilan sosial, perdamaian, dan perlindungan martabat manusia, terutama di wilayah-wilayah yang dilanda konflik.

Negara-negara di Timur Tengah yang memiliki kedekatan geografis dengan Suriah menjadi perhatian utama Paus Fransiskus dalam upayanya mempromosikan perdamaian di negara tersebut. Pada tahun pertama kepausannya, Paus Fransiskus mengadakan pertemuan dengan Presiden Israel, Shimon Peres. Dalam pertemuan yang berlangsung pada April 2013 di Vatikan, pertemuan tersebut membahas kekhawatiran bersama terkait situasi politik dan sosial di kawasan Timur Tengah, termasuk konflik yang tengah berlangsung di Suriah (Holy See Press Office, 2013). Takhta Suci Vatikan dan Israel bersama-sama menekankan pentingnya dialog dan rekonsiliasi sebagai jalan utama dan mendukung pendekatan yang mengutamakan solusi politis melalui perundingan damai antar pihak yang terlibat dalam konflik di Suriah.

Takhta Suci Vatikan juga melakukan pertemuan dengan Raja Abdullah II selaku Raja Yordania di bulan Agustus 2013. Melalui pertemuan ini, Tahta Suci Vatikan mengajak Raja Abdullah untuk berdialog mengenai kondisi Suriah yang memprihatinkan. Baik Tahta Suci Vatikan dan Yordania sepakat bahwasanya dialog adalah tetap dan menjadi satu-satunya solusi untuk krisis Suriah dan sama-sama menolak gagasan intervensi militer internasional terhadap rezim Bashar Al Assad. (Holy See Press Office, 2013). Pertemuan ini menunjukkan pendekatan Tahta Suci Vatikan dalam menghadapi tantangan global, yaitu dengan mengedepankan prinsip-prinsip moral dan spiritual, serta dialog lintas agama dan lintas negara untuk mencapai perdamaian.

Sebagai negara yang memiliki jumlah populasi mayoritas beragama Kristen, Presiden Hongaria bersama dengan Paus Fransiskus menyoroti konflik yang terjadi di Suriah serta

dampak yang diberikan, terutama kepada kelompok Kristiani di Timur Tengah. Selain itu, negara Lithuania, yang juga merupakan negara Eropa yang memiliki populasi umat Kristiani sebagai kelompok mayoritas, bersama dengan Takhta Suci berkomitmen untuk mencari solusi bagi konflik Suriah melalui dialog (Holy See Press Office, 2013). Keterlibatan negara-negara Eropa, khususnya yang memiliki latar belakang Kristen kuat, merupakan salah satu bentuk solidaritas dan tanggung jawab moral mereka dalam melindungi komunitas yang rentan, termasuk umat Kristiani yang terperangkap dalam konflik di Timur Tengah.

Konflik Suriah yang masih terus berlanjut hingga tahun 2016 membuat Paus Fransiskus terus menggencarkan promosi damai bagi Suriah. Pertemuan dengan Presiden Libanon yang diselenggarakan pada tahun 2017 di Vatikan kembali berfokus pada upaya seluruh komunitas internasional untuk mencari solusi damai bagi Suriah melalui dialog. Dalam kesempatan itu, Paus Fransiskus secara langsung mengapresiasi keterbukaan Libanon dalam menampung pengungsi, yang sebagian besar berasal dari Suriah (Holy See Press Office, 2017). Di tahun yang sama, Paus Fransiskus melakukan perjalanan kenegaraan ke Mesir. Paus Fransiskus kembali mengapresiasi bantuan dan keterbukaan yang dilakukan pemerintah dan masyarakat Mesir dalam menampung pengungsi (Holy See Press Office, 2017). Kunjungan Paus ke Mesir juga merupakan bagian dari upaya yang lebih luas untuk mendorong hubungan yang lebih baik antara umat beragama, terutama umat Katolik dan Muslim, dalam menciptakan kedamaian dan kerjasama di wilayah yang rawan konflik ini.

Pada tahun 2016, Takhta Suci Vatikan memperlihatkan langkah nyata dalam upaya diplomatik untuk mengakhiri konflik Suriah melalui tindakan yang dilakukan oleh Kardinal Mario Zenari, Nunsius Apostolik di Suriah. Dalam pertemuannya dengan Presiden Bashar al-Assad, Kardinal Zenari menyampaikan surat langsung dari Paus Fransiskus. Surat tersebut berisi desakan agar pemerintah Suriah menghormati hukum humaniter internasional, termasuk perlindungan terhadap warga sipil yang terdampak perang saudara (the Guardian, 2016). Dalam surat itu, Paus Fransiskus mengutuk segala bentuk ekstremisme dan terorisme yang telah memperburuk krisis Suriah. Beliau juga menyerukan penghentian kekerasan yang berkelanjutan dan mendesak semua pihak, baik nasional maupun internasional, untuk bekerja sama guna mencari solusi damai melalui dialog.

Langkah Paus Fransiskus mencerminkan peran moral dan diplomatik Takhta Suci dalam menyoroti pentingnya kemanusiaan di tengah konflik bersenjata. Paus Fransiskus secara konsisten menekankan bahwa penghormatan terhadap hak asasi manusia dan hukum internasional adalah elemen mendasar dalam mencapai perdamaian yang berkelanjutan di

kawasan tersebut. Ini juga menjadi bagian dari misi Takhta Suci Vatikan untuk menjembatani komunikasi antara pihak-pihak yang bertikai dan komunitas internasional.

Upaya Paus Fransiskus Memberikan Solusi Perdamaian di Suriah melalui Konferensi Internasional.

Melalui konferensi Internasional, Paus Fransiskus mengajak negara-negara untuk bersatu dalam meraih perdamaian di Suriah sebagai salah satu permasalahan internasional. Tahta Suci Vatikan senantiasa berupaya untuk melakukan dialog dengan pihak-pihak yang berperan dan memiliki pengaruh yang diharapkan dapat membantu mencapai kebaikan bersama, sama halnya yang diamanatkan dalam *Pacem In Terris* yang menekankan kebaikan bersama hendaklah pihak-pihak yang berpengaruh besar mempertimbangkan secara serius masalah di dunia yang lebih manusiawi dalam hubungan antar negara di dunia. (Naingolan, 2022). Seruan ini juga menjadi pengingat bagi para pemimpin dunia bahwa perdamaian bukan hanya tanggung jawab individu atau negara tertentu, tetapi upaya kolektif yang membutuhkan komitmen dan kerja sama semua pihak. Dalam menghadapi tantangan global, suara moral Gereja Katolik sering menjadi pengingat akan nilai-nilai kemanusiaan yang universal.

Pada tahun 2014, pertemuan internasional dalam Konferensi Jenewa dilakukan secara khusus untuk membahas perkembangan situasi yang terjadi di Suriah dan bertujuan untuk mencari kemungkinan jalan keluar atau penyelesaian krisis melalui solusi politik. Konferensi tersebut dilatarbelakangi oleh situasi di Suriah yang semakin memburuk dan pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi secara masif (Luerdi, 2016). Paus Fransiskus, melalui Konferensi Jenewa, menyerukan negara-negara untuk berperan dalam perdamaian Suriah. Takhta Suci mengajukan beberapa solusi:

- a. Gencatan Senjata & Penghentian Kekerasan – Semua pihak harus segera menghentikan kekerasan tanpa syarat, menghentikan aliran senjata, dan mengalihkan dana perang ke bantuan kemanusiaan.
- b. Bantuan Kemanusiaan & Rekonstruksi – Penghentian konflik harus disertai dengan peningkatan bantuan serta rekonstruksi infrastruktur yang hancur.
- c. Pemulihan Ekonomi – Rekonstruksi harus dilakukan bersamaan dengan negosiasi, dengan perhatian khusus pada kaum muda agar berkontribusi pada masa depan negara.
- d. Dialog & Rekonsiliasi – Masyarakat Suriah, termasuk komunitas agama, harus membangun kembali kepercayaan melalui dialog.

- e. Dukungan Internasional – Negara-negara regional dan global harus mendorong dialog dan stabilitas, menjadikan Suriah sebagai model perdamaian bagi kawasan lain. (Holy See Press Office, 2014)

Proposal Takhta Suci untuk menyelesaikan konflik Suriah menekankan dialog sebagai kunci utama, bukan solusi militer. (a) Takhta Suci mengusulkan gencatan senjata tanpa syarat, penghentian kekerasan, serta larangan distribusi senjata, dengan dana dialihkan untuk bantuan kemanusiaan. (b) Gencatan senjata harus diiringi dengan peningkatan bantuan, rekonstruksi bagi warga terdampak, dan perbaikan infrastruktur. (c) Rekonstruksi ekonomi perlu didukung komunitas internasional, dengan melibatkan kaum muda sebagai agen perdamaian. (d) Dialog dan rekonsiliasi berbasis spiritual diperlukan untuk membangun kembali komunitas dengan dukungan semua kelompok agama. (e) Keterlibatan regional dan internasional dalam solusi politik sangat penting, karena perdamaian Suriah dapat berdampak pada stabilitas kawasan.

Selama di laksanakannya 2 putaran konferensi Jenewa II di markas PBB tersebut dinilai sia-sia karena tidak menghasilkan satupun keputusan. Kelompok oposisi dan negara-negara pendukungnya menginginkan solusi politik yang ditandai dengan pergantian rezim dan pembentukan badan pemerintahan transisi di Suriah sampai terlaksananya pemilihan umum nasional. Sementara Suriah dan sekutunya menolak tuntutan tersebut dan menginginkan solusi politik dari dalam Suriah tanpa intervensi pihak-pihak luar (Luerdi, 2016). Pemerintah Suriah yang menolak intervensi asing dan berargumen bahwa solusi politik harus berasal dari proses internal di Suriah, bukan dari tekanan internasional.

Peran Takhta Suci dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang diwakili oleh Duta Besar Apostolik untuk PBB, Uskup Agung Bernardito Auza, memberikan pernyataan terkait situasi di Timur Tengah. Dalam pernyataannya, Takhta Suci mengecam keadaan mengerikan di Suriah, termasuk konflik bersenjata yang melibatkan pemerintah Suriah, kelompok pemberontak, dan keterlibatan negara-negara asing (Holy See Press Office, 2014). Pada kesempatan tersebut, Takhta Suci memohon kepada negara-negara untuk menghentikan tindakan yang melanggar hukum kemanusiaan dalam menangani konflik Suriah. Takhta Suci juga menyinggung munculnya gerakan terorisme di Timur Tengah, terutama kelompok ISIS.

Hal ini sejalan dengan visi Takhta Suci Vatikan, Paus Fransiskus terus-menerus menekankan prioritas untuk menempatkan manusia terlebih dahulu, terutama mereka yang menderita, tersingkir, terpinggirkan, dan tertinggal. Gereja Katolik mengekspresikan arti fokus pada manusia yang tertuang di dalam dokumen Konsili Vatikan II : *"Sukacita dan harapan, kesedihan dan kecemasan manusia zaman ini, terutama mereka yang miskin atau tertekan*

dalam bentuk apa pun... adalah sukacita dan harapan, kesedihan, dan kecemasan para pengikut Kristus," karena "tidak ada yang sungguh-sungguh manusiawi yang gagal menggema dalam hati mereka". (Permanent Observer of the Holy See to the United Nations, 2017). Hal ini mencerminkan inti dari misi Gereja Katolik sebagaimana tercermin dalam salah satu dokumen utama Konsili Vatikan II. Pernyataan bahwa Gereja menggarisbawahi solidaritas dengan seluruh umat manusia, terutama yang menderita dan terpinggirkan. Sebagai pengamat permanen di PBB, pendekatan ini menunjukkan bahwa misi Gereja bukan sekadar memberikan bantuan material, tetapi juga menghadirkan harapan, membangun hubungan berbasis kasih, dan mengangkat martabat setiap orang sebagai ciptaan Allah.

Peran Paus Fransiskus dalam Memulihkan Luka bagi Korban Konflik Suriah

Sebagai pemimpin dari 1,2 miliar umat Katolik di seluruh dunia, Paus Fransiskus memiliki sumber daya manusia yang besar yang tersebar di berbagai negara. Konflik Suriah yang terus berlangsung selama masa kepemimpinannya serta krisis kemanusiaan yang menyertai mendorong Paus Fransiskus untuk mengerahkan sumber daya manusia sebanyak mungkin untuk dapat mewujudkan kondisi damai di Suriah serta mengangkat penderitaan warga Suriah (Widianindya, 2018). Usaha Paus Fransiskus untuk menyatukan umat dunia dalam semangat solidaritas dan kemanusiaan ini sangat tercermin dalam pertemuan-pertemuan yang beliau lakukan dengan berbagai kelompok masyarakat, baik pemimpin agama, politik, maupun komunitas-komunitas sipil. Aksi-aksi kemanusiaan dan pesan perdamaian Paus Fransiskus memperlihatkan upaya berkelanjutan Gereja untuk menempatkan martabat manusia sebagai prioritas utama dalam menghadapi tantangan global.

Pada acara Caritas Internasional tahun 2016, Paus Fransiskus merilis sebuah video yang berisi seruan kepada komunitas internasional untuk peduli terhadap krisis kemanusiaan di Suriah. Dalam video tersebut, Paus tidak hanya mengajak masyarakat dunia untuk bersama-sama berdoa dan memberikan bantuan langsung kepada para korban, tetapi juga menyoroti sebuah ironi dalam politik internasional: negara-negara yang menjual senjata sering kali menjadi pihak yang menyerukan perdamaian. Menanggapi kontradiksi ini, Paus Fransiskus menegaskan bahwa perdamaian di Suriah dapat terwujud jika semua pihak bersedia mengambil langkah konkret dan memberikan dukungan nyata (Holy See Press Office, 2016). Dalam tanggapannya, Paus Fransiskus memberikan harapan bahwa perdamaian di Suriah bukanlah hal yang mustahil, asalkan ada komitmen nyata dari semua pihak. Ia menekankan bahwa tindakan nyata dan solidaritas global dapat membantu memulihkan luka batin yang mendalam di masyarakat yang terdampak oleh perang. Seruan ini tidak hanya mencerminkan kepedulian

Gereja Katolik terhadap isu-isu kemanusiaan, tetapi juga menunjukkan peran aktifnya dalam menginspirasi solusi nyata untuk mencapai perdamaian.

Keterlibatan dari Takhta Suci Vatikan dalam konflik Suriah bukan hanya sebatas melakukan seruan seruan perdamaian, namun juga turut membantu masyarakat korban perang dengan menerima beberapa pengungsi, sebagai bentuk mencintai dan penghormatan terhadap tingginya nilai atau martabat seorang manusia sebagai ciptaan Tuhan. Pemberian bantuan secara langsung serta tatap muka yang dilakukan oleh Paus Fransiskus kepada korban krisis kemanusiaan Suriah diharapkan menjadi contoh yang dapat diikuti oleh Gereja Katolik di seluruh dunia (Nainggolan, 2022). Hal ini menegaskan bahwa manusia memiliki martabat yang tinggi yang harus dihormati dalam situasi apa pun, bahkan di tengah-tengah perang. Dengan menerima pengungsi dan memberikan perlindungan, Vatikan memperlihatkan bahwa setiap manusia, terlepas dari latar belakangnya, berhak mendapatkan perlindungan dan penghormatan.

Pada November 2013, *Cor Unum* bekerjasama dengan Caritas Lebanon –cabang dari *Caritas International* dan *Bambino Gesù Pediatric Hospital* untuk memberi bantuan medis bagi anak-anak Suriah yang menjadi pengungsi di Lebanon dan sekitarnya. Paus Fransiskus mengatakan bahwa bantuan yang diberikan melalui *Cor Unum*, Caritas Lebanon, dan *Bambino Gesù' Pediatric Hospital* akan menjadi hadiah natal bagi sekitar tiga hingga empat ribu anak-anak (Holy See Press Office, 2013). Langkah ini menjadi salah satu bentuk perhatian Gereja Katolik terhadap krisis kemanusiaan yang sedang berlangsung di kawasan tersebut, serta komitmen terhadap karya amal dan solidaritas bagi mereka yang menderita, terutama anak-anak yang terkena dampak langsung perang.

Pada tahun 2014, Paus Fransiskus melakukan perjalanan kenegaraannya ke Yordania. Dalam perjalanannya, Paus Fransiskus bertatap muka dengan pengungsi yang berada di Yordania serta anak-anak penyandang disabilitas. Hingga tahun 2014, Yordania negara terbesar ketiga dalam menampung pengungsi Suriah setelah Turki dan Libanon (Operational Portal Refugee Situations, 2014). Takhta Suci mengapresiasi peran Yordania dan negara-negara lain yang bersedia menampung pengungsi; Takhta Suci mengajak negara-negara dan pihak lain untuk terus mendukung Yordania dalam melakukan bantuan terhadap pengungsi. Dalam sesi itu pula, Paus mengecam penggunaan senjata dalam menyelesaikan konflik Suriah. Kepada kaum muda yang ditemuinya dalam kunjungannya ke Yordania, Paus memberikan dorongan dan motivasi agar kaum muda tetap semangat dalam menjalani kehidupan (Holy See Press Office, 2014). Takhta Suci melalui Paus Fransiskus secara konsisten mengajak

komunitas internasional untuk mendukung negara-negara seperti Yordania yang menjadi garis depan dalam menangani krisis pengungsi. Ajakan ini menunjukkan betapa pentingnya solidaritas global dan kerja sama dalam menangani masalah kemanusiaan, terutama krisis pengungsi yang kompleks.

Bentuk pelayanan Takhta Suci Vatikan terhadap korban dari konflik Suriah masih berlanjut. Pada tahun 2015, lewat *Jesuit Refugee Service* (JRS) sebagai salah satu tonggak Gereja Katolik dalam melayani para pengungsi yang tersebar di seluruh dunia. Pemberian pendampingan dan pelayanan yang dilakukan oleh JRS menyulut semangat bagi anak-anak sehingga mereka dapat memandang masa depan mereka kembali. *Jesuit Refugee Service* merupakan organisasi Katolik internasional yang memiliki misi untuk mendampingi, melayani, dan membela pengungsi dan orang-orang terlanjar yang tersebar di berbagai negara (Holy See Press Office, 2015). Takhta Suci mengapresiasi pekerjaan yang telah dilakukan JRS terutama dalam krisis Suriah, yaitu penyediaan pendidikan bagi anak-anak pengungsi. Dalam krisis Suriah, JRS tidak hanya menyediakan kebutuhan dasar seperti makanan dan tempat tinggal, tetapi juga memastikan bahwa anak-anak dan remaja pengungsi mendapatkan akses ke pendidikan, sehingga mereka dapat membangun masa depan yang lebih baik meskipun dalam situasi yang sulit.

Takhta Suci juga melihat bahwa salah satu dampak dari perang ini adalah tingginya angka pengungsi di Suriah dan membutuhkan uluran tangan. Oleh karena itu, Tahta Suci Vatikan menyambut dan terbuka dengan pencari suaka di Italia. Adapun izin penerimaan pengungsi ini merupakan hasil negosiasi berbulan-bulan antara Dewan Amal Kepausan dan Kementerian Dalam Negeri Italia. Di tahun 2016, se usai melaksanakan kunjungan kenegaraan di Lesbos, Yunani, Paus Fransiskus membawa 12 pengungsi yang berasal dari Suriah yang berada di Lesbos dan memfasilitasinya menjadi 3 keluarga. (BBC, 2016). Langkah ini merupakan hasil kerja keras dan kolaborasi antara Dewan Amal Kepausan dengan Kementerian Dalam Negeri Italia, yang memerlukan negosiasi berbulan-bulan. Tindakan yang menunjukkan komitmen Vatikan terhadap solidaritas kemanusiaan, khususnya dalam memberikan bantuan konkret kepada mereka yang terdampak perang dan kehilangan tempat tinggal.

Kesimpulan

Paus Fransiskus memainkan peran unik dalam diplomasi berbasis keimanan dengan menekankan perdamaian yang berakar pada nilai moral dan spiritual. Melalui ensiklik dan pernyataannya, Takhta Suci Vatikan mendorong dialog, rekonsiliasi, serta keadilan sosial dalam menangani konflik, termasuk di Suriah. Diplomasi ini menyoroti solidaritas,

penghormatan terhadap hukum internasional, dan perlindungan martabat manusia. Sejak 2013, Paus Fransiskus menunjukkan komitmen kuat terhadap perdamaian global melalui mediasi konflik, seruan di PBB, serta dukungan bagi pengungsi. Kepemimpinannya menegaskan bahwa solusi berkelanjutan memerlukan dialog, kerja sama, dan aksi nyata, menjadikan Vatikan sebagai perantara moral dalam menciptakan dunia yang lebih adil dan harmonis.

Referensi

- Blakemore, S. (2019). Faith-Based Diplomacy and Interfaith Dialogue. *Brill Research Perspectives in Diplomacy and Foreign Policy*, 3(2), 1-124.
- Creswell, John W. (2016). *Research Design : Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif dan Campuran. Edisi Keempat (Cetakan Kesatu)*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Finnemore, M. (1996). *National Interests in International Society*. New York : Cornell University Press.
- Johnston, D. (2003). *Faith-based Diplomacy: Trumping Realpolitik*. England: Oxford University Press.
- Kusumaatmadja, Mochtar & Etty R. Agoes. (2012). *Pengantar Hukum Internasional*. Bandung: P.T Alumni
- Nainggolan, N. Y. (2022). Pacem In Terris dalam Kebijakan Luar Negeri Takhta Suci Vatikan terhadap Konflik Suriah. Skripsi., Universitas Diponegoro
- Prasetio, K.A. (2017). Peningkatan Ekskalasi Konflik Suriah Pasca Arab Spring Tahun 2010-2015. Skripsi., Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Rieck, C. E., & Niebuhr, D. (2015). Microstate and Superpower: The Vatican in International Politics. *KAS International Reports*, 2015(6), 56-72.
- Widianindya, F. C. (2018). *Implementasi Evangelii Gaudium dalam kebijakan luar negeri Takhta Suci Vatikan pada konflik Suriah*. Skripsi., Universitas Parahyangan.
- Yanubi, Y. S., Wattimena, J. A. Y., & Peilouw, J. S. F. (2022). Eksistensi Takhta Suci Vatikan: Relevansinya terhadap Penundukan Diri Suatu Negara. (*Uti Possidetis: Journal of International Law*, 3(2), 136-157).

Website

- Bate, S.T (2019) "Vatikan: Negara vs Institusi Gereja. Diakses 5 Mei 2024 melalui: <https://kumparan.com/hoga-toda/vatikan-negara-vs-institusi-gereja-1qZToL5aocO>

BBC News. (2018). "Investigasi BBC tentang senjata kimia di Suriah: 'Gemetar, busa keluar dari mulut'". Diakses 8 September 2024 melalui: [dari https://www.bbc.com/indonesia/dunia-45906577](https://www.bbc.com/indonesia/dunia-45906577)

Holy See Press Office. (2017). "Comunicato della Sala Stampa: Udienza al Presidente della Repubblica del Libano." Diakses 13 Agustus 2024 melalui: <https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2017/03/16/0158/00373.htm>.

Holy See Press Office. (2013). "Comunicato della Sala Stampa: Udienza al Presidente della Repubblica di Ungheria." Diakses 16 Agustus 2024 melalui: <https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2020/02/14/0098/00213.html>.

Holy See Press Office. (2013). "Comunicato della Sala Stampa: Udienza al Presidente della Repubblica di Ungheria". Diakses 19 Agustus 2024 melalui: <https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2020/02/14/0098/00213.html>

Holy See Press Office. (2013). "Comunicato della Sala Stampa: Udienza al Presidente dello Stato di Israele Shimon Peres". Diakses 18 Agustus 2024 melalui: <https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2013/04/30/0262/00591.html#TRADUZIONE%20IN%20LINGUA%20INGLESE>

Holy See Press Office. (2013). "Comunicato della Sala Stampa: Udienza al Presidente dello Stato di Palestina". Diakses 17 Agustus 2024 melalui: <https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2019/12/20/1020/02084.html>

Holy See Press Office. (2013). "Comunicato della Sala Stampa: Udienza al Primo Ministro di Lithuania". Diakses 17 Agustus 2024 melalui: <https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2013/09/19/0587/01302.html>

Holy See Press Office. (2016). "Comunicato della Sala Stampa: Udienza al Primo Ministro della Polonia". Diakses 19 Agustus 2024 melalui: <https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2016/05/13/0343.html>

Holy See Press Office. (2013). "Comunicato della Sala Stampa: Udienza al Re e alla Regina di Giordania". Diakses 19 Agustus 2024 melalui: <https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2013/08/29/0539/01186.html>

Holy See Press Office. (2013). "Comunicato della Sala Stampa: Udienza al Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite". Diakses 15 Agustus 2024 melalui:

<https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2019/12/20/1020/02084.html>

Holy See Press Office. (2016). "Conferenza di Papa Francesco nel Volo di Ritorno dal Viaggio Apostolico in Svezia in Occasione della Commemorazione Ecumenica Luterano-Cattolica della Riforma". Diakses 28 Juli 2024 melalui: <https://www.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2021/11/04/0721.html>

Holy See Press Office. (2013). "Conferenza Stampa di Presentazione della Missione Sanitaria per I Bambini Siriani Rifugiati in Libano". Diakses 1 September 2024 melalui: <https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2016/11/01/0789/01764.html>

Holy See Press Office. (2016). "Dichiarazione del Direttore della Sala stampa della Santa Sede". Diakses 1 September 2024 melalui: <https://www.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2013/11/27/0789.pdf>

Holy See Press Office. (2017). "Intervento del Capo Delegazione della Santa Sede all'ONU sulla Pace e una Vita Dignitosa su un Pianeta Sostenibile". Diakses 27 Juli 2024 melalui: <https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2024/10/22/0815/01627.html>

Holy See Press Office. (2014). "Intervento della Santa Sede alla Conferenza Internazionale per la Pace in Siria Ginevra 2". Diakses 1 September 2024 melalui: <https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2014/01/23/0054/00109.html>

Holy See Press Office. (2016). "Intervento della Santa Sede alla Conferenza "Sostenere la Siria e la Regione". Diakses 4 September 2024 melalui: <https://www.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2016/02/04/0081.pdf>

Holy See Press Office. (2017). "Intervento del Segretario per I Rapporti con gli Stati della Santa Sede alla Conferenza di Bruxelles sulla Siria". Diakses 3 September 2024 melalui: https://www.vatican.va/roman_curia/secretariat_state/2020/documents/rc-seg-st-20201106_gallagher-diplomazia-santasede_it.html

Holy See Press Office. (2017). "Intervento del Segretario per I Rapporti con gli Stati alla 72 ma Sessione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite sulla Crisi Siriana". Diakses 6 September 2024 melalui: <https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2017/09/22/0623/01374.html>

Holy See Press Office. (2013). "Le Parole del Papa alla Recita dell'Angelus". Diakses 1 September 2024 melalui:

<https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2024/11/17/0903/01803.html>

Holy See Press Office. (2013). “Lettera del Santo Padre Francesco al Presidente della Federazione Russa in Occasione del Vertice del G20 di San Pietroburgo”. Diakses 20 Agustus 2024 melalui:

https://www.vatican.va/content/francesco/it/letters/2013/documents/papa-francesco_20130904_putin-g20.html

Holy See Press Office. (2016). “Lettera del Santo Padre Francesco a Sua Santità Tawardos II per la Giornata dell’Amicizia Copto-Cattolica”. Diakses 30 September 2024 melalui:

<https://www.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2016/05/10/0332/00764.pdf>

Holy See Press Office. (2014). “Pellegrinaggio di Sua Santità Francesco in Terra Santa”. Diakses 17 Agustus 2024 melalui:

https://www.vatican.va/content/francesco/it/audiences/2014/documents/papa-francesco_20140528_udienza-generale.html

Holy See Press Office. (2013). “Press Release on the Islamic-Catholic Liaison Committee”. Diakses 10 Agustus 2024 melalui:

<https://www.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2013/06/26/0422/00968.pdf>

Holy See Press Office. (2014). “Statement of the Holy See to the UN in New York at the Security Council Open Debate on the Situation in the Middle East”. Diakses 9 Agustus 2024 melalui: <https://holyseemission.org/contents/statements/65ba8b88194eb.php>

Holy See Press Office. (2016). “Statement of the Holy See to the UN at the 28th Session of the Human Rights Council”. Diakses 23 Juli 2024 melalui:

<https://www.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2015/03/27/0222.pdf>

Holy See Press Office. (2015). “Udienza al “Jesuit Refugee Service”. Diakses 5 Agustus 2024 melalui: <https://www.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2015/11/14/0884/01974.pdf>

Human Right Watch. (2019). World Report 2019 / Country Chapters Syria. New York: Human Right Watch

Keuskupan Agung Jakarta. (2013). “Damai bagi Suriah”. Diakses 1 Maret 2024 melalui <https://www.kaj.or.id/read/2013/09/12/6423/damai-bagi-suriah.php>.

Konferensi Waligereja Indonesia. (2017). “*Seri Dokumen Gerejawi No. 7: Lumen Gentium*”. Diakses 8 Agustus 2024 melalui <https://www.dokpenkwi.org/sdg-7-lumen-gentium/>.

Konferensi Waligereja Indonesia. (2017). “*Seri Dokumen Gerejawi No. 94: Evangelii Gaudium*”. Diakses 8 Agustus 2024 melalui: <https://www.dokpenkwi.org/sdg-94-evangelii-gaudium/>.